



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2019



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
Jl. A. Yani No. Telanai Pura Jambi 36122

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	iv
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	v
NERACA.....	vi
LAPORAN OPERASIONAL	vii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	viii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.4. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan	6
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	8
2.1. Ekonomi Makro	8
2.2. Upaya Pencapaian Pelaksanaan Visi dan Misi	9
2.3. Kebijakan Keuangan	13
2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	14
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	20
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	20
3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Yang Telah Ditetapkan	21
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	23
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	23
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	23
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	23
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	25
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	31
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	31
5.2. Neraca	36

5.4	Laporan Operasional	42
5.5	Laporan Perubahan Ekuitas	47
BAB VI INFORMASI NON-KEUANGAN		49
6.1.	Domisili dan Bentuk Hukum Entitas	49
6.2.	Program Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	49
BAB VII PENUTUP		52
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Saldo Akhir Dana BOS per 31 Desember 2019
Lampiran 2 Saldo Buku Besar Aset

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Perubahan Ekuitas dan; (f) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah direview oleh Inspektorat Provinsi Jambi dan disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional Keuangan, Perubahan Ekuitas, Arus Kas dan Posisi Keuangan serta Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAMBI

Muhammad Syahrani, SE, MM

Nip. 19711109 200501 1 007



**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam pelaporan keuangan dibedakan menjadi 2 (dua) entitas yaitu:

- 1) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
- 2) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi merupakan salah satu entitas akuntansi yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan oleh karenanya wajib menyusun Laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Dinas Pendidikan berdasarkan standar akuntansi berbasis akrual seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBD. Basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam Penyajian Laporan Keuangannya terdiri atas :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Salah satu elemen laporan keuangan adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, dalam CaLK juga dapat dijelaskan berbagai faktor, asumsi, dan kondisi yang mempengaruhi angka-angka Laporan Keuangan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Kebijakan Keuangan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan Keuangan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di bidang pendidikan di Jambi.
- 2) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas

seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk kepentingan masyarakat.

c. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. **Keseimbangan Antar generasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. **Evaluasi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

2. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta hasil-hasil yang telah dicapai.
5. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya.
6. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan dan pengeluarannya dan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pengalokasian anggaran.

7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ini disusun Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

- 1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 10) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 5 April 2007 Nomor 900/316/BAKD/2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
- 12) Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 13) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
- 14) Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, indikator tersebut adalah:

1. Masukan (Input), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan.
2. Keluaran (Output) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
3. Hasil (Outcome) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Manfaat (Benefit) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil.
5. Dampak (Impact) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Sistematika penulisan yang dilakukan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini akan didominasi berbentuk narasi deskriptif dengan penjelasan-penjelasan tambahan yang singkat dan jelas disertai angka-angka yang sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019. Cara penulisan ini diharapkan dapat memberi penjelasan yang memadai tentang aktivitas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tergambarkan melalui laporan keuangan.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan dibagi dalam 7 bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

- 1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- BAB II : Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD**
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Upaya Pencapaian Pelaksanaan Visi dan Misi
 - 2.3. Kebijakan Keuangan
 - 2.4. Indikator pencapaian target kinerja APBD
- BAB III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- BAB IV : Kebijakan Akuntansi**
 - 4.1. Entitas akuntansi keuangan daerah
 - 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
- BAB V : Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan**
 - 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- BAB VI : Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan**
- BAB VII : Penutup**

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dalam perkembangannya, pranata ekonomi memelihara kelangsungan sistem nilainya tidak pernah lepas dari keterkaitan dengan ruang-ruang sosial lainnya, yaitu pranata politik, pendidikan, kemasyarakatan atau keluarga maupun agama. Disini dapat diamati karakteristik hubungan pranata sosial dalam masyarakat terkin yang cenderung bersifat kompleks, fungsional, independen, serta memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga mampu menjabarkan sebuah pola hubungan yang bersifat sistemik, konsekuensi di tiap pendidikan dengan sektor ekonomi masyarakat Indonesia memiliki hubungan yang erat, dimana kedua komponen lembaga tersebut merupakan aset negara yang memerlukan pengelolaan secara hati-hati dan cermat.

Secara lebih khusus hubungannya menyangkut modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang menjadi tiga faktor pokok sebagai masukan (input) dalam produksi pendapatan nasional. Semakin besar jumlah tenaga kerja terdidik semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal. Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Bagaimana pun pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun sikap mental, sehingga dapat menjadi subjek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu, dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi yang ada, kebijakan link and match mendapatkan tempat sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pendidikan. Namun sayang, nyai di link and match yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh kualitas kurikulum sekolah yang memadai untuk menciptakan lulusan yang siap kerja. Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah salah satu jalur menuju ke sana.

Oleh karena itu harus ada perubahan paradigma, agar proses pembangunan mampu mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah SDA dan bisa semakin memandirikan struktur ekonomi bangsa. Supaya visi tersebut pun terjadi berbagai daerah, maka harus ada koreksi total kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat makro dengan berbasis kepada pluralitas daerah. Dengan demikian diharapkan akan tercipta SDM yang mampu memperjuangkan kebutuhan dan penguatan masyarakat lokal.

2.2 Upaya Pencapaian Pelaksanaan Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan suatu kondisi yang akan dicapai Provinsi Jambi dalam periode lima tahun. visi Provinsi Jambi yang akan diwujudkan adalah: **TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA (JAMBI TUNTAS 2021)**

Visi : TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA

Mengacu pada Visi Provinsi Jambi dan memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta mempertimbangkan berbagai isu di bidang Pendidikan maka Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menetapkan visi yaitu: **MEWUJUDKAN INSAN CERDAS DAN BERDAYA SAING**

Visi : MEWUJUDKAN INSAN CERDAS DAN BERDAYA SAING

Penjelasan tentang arti, atau makna dari kata kunci visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan, mengandung arti "membentuk, atau mendirikan". Dengan demikian, Mewujudkan dalam hal ini diartikan sebagai "aktivitas untuk membentuk, mendirikan sesuatu ke arah yang lebih baik".
- Insan, adalah sebagai suatu konsep yang dimaknai bahwa manusia sebagai makhluk yang paling mulia, memiliki akal dan budi pekerti, memiliki potensi untuk dibangun ke arah yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- Cerdas, adalah suatu konsep pencapaian aktualisasi potensi manusia yang mampu mendayagunakan atau mensinergikan kemampuan emosional, akademis/intelektual, dan spritual menjadi kekuatan yang positif yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kesulitan, persoalan, dan masalah yang dihadapi.
- Berdaya Saing, adalah suatu konsep yang diartikan sebagai suatu kondisi individu/kelompok yang memiliki kemampuan atau kekuatan untuk memenangkan suatu persaingan/perlombaan. Dengan demikian Berdaya Saing berarti Sumber Daya Manusia Jambi memiliki kemampuan untuk memenangi dari suatu persaingan atau perlombaan.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat didefenisikan secara operasional tentang Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai berikut : "Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jambi adalah instansi pemerintah/satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jambi yang berupaya untuk mewujudkan penduduk Jambi menjadi manusia yang : (1) memiliki kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual; (2) berperilaku sesuai tuntunan agama, norma-norma yang berlaku di masyarakat dan mematuhi peraturan perundang-undangan; (3) memiliki pemahaman sekaligus dapat memanfaatkan IPTEK; (4) memiliki kemampuan untuk memenangi persaingan dari suatu kompetisi atau perlombaan; (5) memiliki kemampuan/kekuatan untuk melangkah berkompetisi dengan orang atau pihak lain; dan (6) memiliki kemampuan untuk bergaul dan beradaptasi dalam percaturan dunia global yang serba cepat, sehingga terwujud masyarakat Jambi yang sejahtera dan terlepas dari segala kesukaran hidup.

2.2.2 Misi

Misi adalah sesuatu tugas yang diemban dan ingin diwujudkan oleh instansi sebagai penjabaran atas visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat

mengetahui dan mengenal eksistensi serta peranan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menetapkan misi, yaitu :

1. Meningkatkan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan.
2. Optimalisasi kapasitas sumber daya aparatur baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang handal guna tercapainya *good governance* bidang pendidikan.

Penetapan misi tersebut di atas dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

a. Misi Pertama

Misi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan misi pembangunan pemerintah Provinsi Jambi dan tuntutan amanat undang-undang bahwa setiap warga negara dan seluruh penduduk Jambi berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak. Tuntutan tersebut pada kenyataannya masih belum dapat diwujudkan secara penuh oleh karena beberapa sebab antara lain:

- 1) Keterbatasan anggaran pendidikan di Provinsi dan Kabupaten dan Kota.
- 2) Kurangnya sinergitas perencanaan pendidikan.
- 3) Kompetensi guru yang belum maksimal.
- 4) Jumlah penduduk yang menyebar dan luasnya jangkauan wilayah.
- 5) Daya belimasyarakat yang masih rendah.

b. Misi Kedua

Misi tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Penyelenggaraan pengelolaan yang baik dan prima dapat dilaksanakan manakala kualitas sumber daya aparatur pendidik maupun tenaga kependidikan meningkat, maka kinerja kelembagaan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat ditingkatkan secara optimal.

Permasalahan tersebut di atas tentu saja tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi

Jambi, melainkan butuh kerja sama dan sinergitas yang baik dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Jambi serta *stakeholders* pendidikan dan masyarakat

pada umumnya. Oleh karenanya, misi yang ditetapkan tersebut mengisyaratkan pentingnya keterlibatan/partisipasi dari berbagai pihak. Untuk memberikan kebersamaan langkah dalam mencapai tujuan perlu kiranya dirumuskan nilai-nilai instansi yang akan dianut bersama. Nilai-nilai ini harus mampu menggambarkan tatanan nilai dan falsafah yang dianut bersama dalam melaksanakan tugas-tugas yang nantinya akan terkait erat dengan kegiatan pelayanan yang akan diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kepada *stakeholders*/masyarakat.

Pemilihan nilai-nilai tersebut bukan berarti mengesampingkan nilai-nilai luhur lainnya. Berikut nilai-nilai luhur Dinas Pendidikan Provinsi Jambi:

1) Profesionalisme

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya manusia yang profesional. Hal ini bermakna bahwa dalam menjalankan tugasnya, pegawai harus memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil, dan memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengembangkan visi dan misi organisasi.

Kapabilitas merupakan hal yang sangat krusial bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengingat perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Perubahan yang sangat cepat tersebut mustahil akan dapat direspons dengan baik apabila tidak ditunjang dengan adanya kapabilitas dari para pelaksana kegiatan/program/kebijakan organisasi, dan kapabilitas pegawai tidak tumbuh dengan sendirinya melainkan harus melalui suatu proses yang terencana dan berkesinambungan serta didukung dengan penyediaan sarana penunjang yang baik, tepat dan memadai.

Dengan kapabilitas yang tinggi, pegawai akan terpicu untuk bekerja dengan berorientasi pada hasil. Di samping itu, kapabilitas yang tinggi tersebut akan dapat mendorong terhadap peningkatan integritas moral/etika untuk berinteraksi dengan rekan sejawat, bawahan, atasan, maupun dengan pihak-pihak luar organisasi.

2) Keseimbangan

Keseimbangan merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk meyakinkan adanya keharmonisan dalam pelaksanaan tugas-tugas

organisasi. Semua elemen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Setiap elemen organisasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan dan tidak bekerja secara terkotak-kotak. Selain itu, organisasi tidak bisa hanya menuntut kewajiban dari para anggota organisasinya tanpa memikirkan hak mereka.

3) Kemitraan

Di dalam era demokrasi yang sedang berkembang saat ini, pola-pola kerja kemitraan perlu dikembangkan dan diupayakan menghindarkan diri dari pola-pola lama yang menggunakan pendekatan kewenangan (*power approach*) ke pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan stakeholder (*stakeholder oriented approach*), sehingga terjalin hubungan yang harmonis/positif dengan pihak-pihak terkait seperti dengan Pemerintah Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi/Kabupaten/ Kota, Jajaran Kementrian Agama dan *stakeholders* pendidikan lainnya.

2.3 Kebijakan Keuangan

Perhitungan APBD merupakan dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai Pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang telah ditutup, oleh karenanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Pertanggungjawaban keuangan ini digunakan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik sebagai perwujudan asas transparansi, demokrasi dan akuntabilitas dalam rangka perwujudan *Good Governance*.

Dalam pendekatan kinerja, maka usulan program, kegiatan dan anggaran dinilai tingkat kewajarannya melalui rasionalisasi dan sinkronisasi program, dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan Organisasi Perangkat Daerah harus memuat hal-hal di bawah ini agar dapat dievaluasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi pengalokasian anggaran :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan dan pengeluarannya.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
7. Sebagai pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan anggaran yang diberikan.
8. Sebagai bahan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Pendidikan Provinsi
Jambi**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Pembayaran Rekening (bulan)	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Rutin Kantor
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Realisasi Serapan Anggaran	Peningkatan SDM Aparatur Pengguna Anggaran
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode Pemakaian Jasa Kebersihan Kantor (bulan)	Peningkatan Kualitas Pekerjaan
6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Rutin Kantor
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan SDM Aparatur Pengguna Anggaran dan Pengelola Keuangan
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Penerangan Kantor	Terlaksananya Penerangan Kantor
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memiliki Kreativitas dan Inovasi	Peningkatan Kualitas Aparatur
10	Penyediaan makanan dan minuman	Efisiensi Pelaksana Pekerjaan	Peningkatan SDM Aparatur Pengguna Anggaran dan Pengelola Keuangan
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Efisiensi Pengelolaan Keuangan	Peningkatan Aparatur Pengguna Anggaran dan Pengelola Keuangan
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>		
12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Efisiensi Pengelolaan Administrasi Kegiatan dan Penatausahaan Keuangan	Lancarnya Pelaksanaan Tugas dan Tepat Sasaran dan SDM Aparatur
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Lebih Efektif dan Efisiensi	Efisiensi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor
14	Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan gedung kantor	Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Lebih Efektif dan Efisien	Efisiensi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor
15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan	Efisiensi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
		Lebih Efektif dan Efisien	
16	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Efisiensi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	terawatnya gedung kantor
	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>		
17	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Pekerjaan	Peningkatan SDM Aparatur Pengguna Anggaran
	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>		
18	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Meningkatkan Kinerja di Bidang Administrasi	Menjadikan Tenaga Profesional yang Ahli di Bidangnya
	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>		
19	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Laporan Kinerja Keuangan	Tersusunnya Laporan tahunan dinas pendidikan provinsi Jambi
	<i>Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus</i>		
20	Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana PKLK	Tersedianya Sarana Prasarana di Tingkat PKLK	Meningkatnya kualitas belajar
21	Penyelenggaraan Event-Event Tingkat Provinsi/Nasional	Terpenuhinya kegiatan lomba-lomba ke tingkat nasional Terlaksananya kegiatan lomba tingkat nasional, Meningkatnya kompetensi siswa yang berkebutuhan khusus	meningkatnya kualitas Kompetensi Siswa yang Berkebutuhan Khusus dan Terlaksananya Lomba Tingkat Nasional
22	Penyelenggaraan PKLK	terpenuhinya penyelenggaraan PKLK	meningkatnya kualitas penyelenggaraan PKLK
23	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dan PTK	terpenuhinya produk unggulan PKLK	Meningkatnya kualitas belajar
24	Kegiatan Penyelenggaraan PLA	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan autis	meningkatnya kualitas belajar
	<i>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>		
25	Kegiatan Pelatihan Tenaga Kependidikan dan Laboran Sekolah	Tenaga Tata usaha dan Laboran Sekolah	Tenaga Tata usaha dan Laboran Yang telah Mengikuti Pelatihan
26	Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap	Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tutor Paket A, B, C yang	Terseleksinya 209 Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Tingkat

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
	Profesi Pendidik	diseleksi	Provinsi
27	Kegiatan Pelatihan Kepala Sekolah dan Pengawasan Sekolah	Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang dilatih dan diseleksi	Terlatihnya 264 kepala Sekolah dan Pengawas dan terseleksinya 264 Kepala Sekolah dan Pengawas
28	Kegiatan Pelatihan Kompetensi Guru	Guru yang Dilatih	Terlatihnya 800 Guru SMA dan SMA Seprov
29	Kegiatan Pembinaan MGMP	Jumlah Guru yang dilatih	Terbinanya Guru Melalui Kelompok Kerja (MGMP)
	Program Pembinaan SMA		
30	Kegiatan Pengadaan Peralatan SMA	Tersedianya Peralatan SMA	Meningkatnya nilai hasil ujian
31	Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama	tersedianya penyelenggaraan sekolah berasrama	Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan di Sekolah Asrama
32	Pembinaan Olimpiade Sain Nasional	terlaksananya OSN	meningkatnya kualitas pendidikan di bidang Sains
33	Kegiatan Pembinaan Debat Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan LCC 4 Pilar (SMA)	terlaksananya pembinaan dan seleksi Lomba Debat B. Indonesia, B. Inggris, LCC 4 Pilar dan Karakter Siswa SMA	Tersalurnya Bakat, Minat, Prestasi Siswa SMA
34	Bimtek Pengolahan Dana BOS dan APBN (SMA)	terlaksananya Kegiatan Diklat Pengelolaan Dana BOS	meningkatnya kualitas belajar
35	Kegiatan Rakor Manajemen SMA	Terlaksananya Pelatihan pementapan peningkatan Guru yang di UN kan Diklat Peningkatan dan Desain Pembelajaran Kurikulum 2013, Diklat Peningkatan kompetensi sekolah penyele	Meningkatnya nilai mata pelajaran yang di UN kan
36	Kegiatan Pengadaan Meubiler SMA	Tersedianya Meubelair SMA	meningkatnya kualitas belajar
37	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	Meningkatnya rasio siswa dengan Ruang Kelas	Meningkatnya Daya Tampung Siswa/Siswi
38	Kegiatan Pembinaan Peserta O2SN dan FLS2N	terlaksananya kegiatan O2SN dan FLS2N	Tersalurnya Minat, Bakat, Prestasi siswa
39	Kegiatan BOS APBN	tersedianya peralatan SMA	meningkatnya nilai hasil ujian
	Program Pembinaan SMK		
40	Kegiatan Pengadaan Peralatan SMK	Tersedianya Peralatan SMK	Meningkatnya nilai hasil ujian
41	Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama	Terselenggaranya Penyelenggaraan Sekolah Berasrama	meningkatnya kualitas belajar

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
42	Kegiatan Pembangunan/Turaf, Pagar SMK	Terbangunnya Turap dan Pagar Sekolah	Terpenuhinya Sarana Penunjang SMK
43	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	Terjaringnya Siswa Berprestasi Bidang Olah Raga	meningkatnya kualitas pendidikan
44	Kegiatan Inovasi dan Kewirausahaan/Re-Engineering	Terlaksananya Peningkatan Mutu SMK	meningkatnya kualitas belajar
45	Kegiatan Kompetensi Siswa SMK	Terwakili Bidang Keahlian Siswa Tingkat Nasional	meningkatnya kualitas belajar
46	Kegiatan Pembinaan Lomba Siswa Tingkat Nasional	Terlaksananya Pembinaan Lomba Siswa Tingkat Nasional	
47	Pembinaan Sekolah Rujukan/Kerjasama (SMK)	Meningkatkan Mutu Kompetensi Siswa	meningkatnya kualitas belajar
48	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK	Terpenuhinya Rencana Pembangunan RKB	meningkatnya kualitas belajar
49	Kegiatan Pengadaan Meubiler SMK	Jumlah Meubiler Sekolah	Jumlah Siswa
50	Pengembangan Kurikulum K13	Terlaksananya Diklat Kurikulum K13	Meningkatnya kompetensi sekolah penyelenggara Kurikulum 2013
	<i>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</i>		
51	Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Lalulintas disekolah	meningkatnya Kesadaran Para Siswa/Siswi untuk mematuhi Aturan yang berlaku
52	Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	Terlaksananya sosialisasi, advokasi dan pendataan bidang pendidikan	Meningkatnya tata kelola pendidikan
53	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Pengawasan	terlaksananya monitoring dan evaluasi
54	Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Kab./Kota	terlaksananya koordinasi perencanaan pendidikan provinsi jambi	terciptanya persamaan persepsi tentang perencanaan pendidikan antara provinsi dan kab/kota
55	Kegiatan Pembinaan Pramuka	terlaksananya kursus mahir dasar jenjang SMA/SMK	tersedianya pembina jenjang SMA/SMK yang telah mengikuti KMD (kursus mahir dasar)
56	Kegiatan Pembinaan UKS	terlaksananya pembinaan UKS dikabupaten/kota dan provinsi	persentase sekolah sehat di provinsi
57	Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren	terlaksananya bimtek guru MA serta Peantren Ramadhan	Tersedianya guru mata pelajaran umum di pondok pesantren yang berkualitas

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
58	Kegiatan Pengurus Utama Gender	terlaksananya kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender	Tersedianya Anggaran Responsif Gender di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi
59	Kegiatan Pembinaan Minat Baca	Terlaksananya Lomba Penulisan artikel	Tersedianya artikel yang berkualitas
60	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi TIK Pendidikan	Jumlah guru memiliki kompetensi di Bid. TIK	Meningkatnya kompetensi guru bidang TIK
61	Kegiatan Pengelolaan Jejaring dan Publikasi Pendidikan	Tersedianya data, jaringan dan publikasi pendidikan	tersedianya data, jaringan dan publikasi pendidikan
62	Kegiatan Produksi TIK Pendidikan	tersedianya sumber belajar berbasis TIK SMA/SMK	tersedianya sumber belajar berbasis TIK SMA/SMK
63	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK Pendidikan	Terlaksananya Fasilitas Komputer Dinas Pendidikan dan UNBK	Tersedianya Fasilitas Komputer Dinas Pendidikan dan UNBK
64	Kegiatan PPDB Online	Terlaksananya PPDB Online	Terlayaninya PPDB Online
	<i>Program Beasiswa dan Bosda</i>		
65	Beasiswa	tersedianya Beasiswa Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Jambi
66	Pembayaran PTK NON PNS SMA/SMK	tersedianya Honor PTT PTK Non PNS	Terbayarnya honorarium PTT, PTK Non PNS Jenjang SMA dan SMK Seprovinsi Jambi

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan
(Dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Pendapatan Daerah	Anggaran Tahun 2019	Realisasi TA 2019	
			Jumlah	%
1	Pendapatan Asli Daerah	13.000.000,00	12.350.000,00	95,00
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	13.000.000,00	12.350.000,00	95,00

Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran sebesar Rp.13.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.12.350.000,00 atau 95,00%. Target Retribusi Daerah naik. Kenaikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah ini disebabkan karena adanya kenaikan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (lapangan tenis).

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, pada TA 2019 Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dianggarkan sebesar Rp1.186.998.286.844,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.065.828.307.647,00 atau 89,79% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebesar Rp121.169.979.197,00. Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal.

Belanja Operasi TA 2019 dengan target sebesar Rp1.060.316.227.886,00 terealisasi sebesar Rp912.311.162.778,00 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi

Belanja Operasi TA 2019

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Pegawai	648.084.780.936,00	634.632.587.159,00	97,92
2.	Belanja Barang dan Jasa	412.231.446.950,00	277.678.575.619,00	67,36
J u m l a h		1.060.316.227.886,00	Rp912.311.162.778,00	86,04

Pada TA 2019, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp126.682.058.958,00 dan terealisasi sebesar Rp153.517.144.869,00 atau 121,18% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2019

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.533.663.000,00	38.190.045.193,00	96,60
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.448.027.050,00	75.203.941.275,00	95,86
3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	275.000.000,00	273.600.400,00	99,49
4.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	8.425.368.908,00	39.849.558.001,00	472,97
J u m l a h		126.682.058.958,00	153.517.144.869,00	121,18

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 tidak terdapat hambatan dan kendala yang berarti sehingga realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 86,04% itu menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan sudah efektif dan efisien.

Khusus untuk pelaksanaan kegiatan BOS ada kendala antara Lain:

1. Jauhnya jarak sekolah yang berakibat pada susahny penyampaian laporan dan pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS.
2. Keterbatasan Infrastruktur (Ketersediaan Internet) di beberapa sekolah.
3. Masih terbatasnya pemahaman sekolah terhadap pengelolaan Keuangan Daerah (Dana BOS).

Yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

1. Melakukan konsolidasi setiap triwulan atau pada saat setelah pencairan dana BOS di setiap kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi
2. Penyusunan Perencanaan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban sudah berbasis Web atau menggunakan Aplikasi Sip BOS yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Dinas Pendidikan

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyajikan saldo akun-akun tahun 2019 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya dan Bagan Akun Standar pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

2) **Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD).

3) **Surplus/Defisit-LRA**

Adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

4) **Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa)**

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

5) **Aset**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan, sedangkan Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

6) **Kewajiban**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

7) **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

8) Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

(1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

(2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

(3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan :

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

2. Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

3. Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan);
- 2) Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

4. Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- 3) Persediaan disajikan sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- 4) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode Perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi);
- 5) Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara FIFO.

5. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- 2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - (1) Tanah;
 - (2) Peralatan dan Mesin;
 - (3) Gedung dan Bangunan;
 - (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - (5) Aset Tetap Lainnya;
 - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 5) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);
- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- 8) Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);
- 9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

6. Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
 - (1) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
 - (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer*/BOT) (Kewenangan PPKD)
 - (3) Aset lain-lain(Kewenangan PPKD)
 - (4) Aset Tak Berwujud; (Kewenangan SKPD)
 - (5) Aset Lainnya.(Kewenangan SKPD)
- 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;
- 4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2019 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

7. Akuntansi KewajibanJangka Pendek

- 1) KewajibanJangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) KewajibanJangka Pendek diantaranya terdiri atas:
 - (1) Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
 - (3) Utang Jangka Pendek.
 - (4) Utang Belanja
 - (5) Pendapatan diterima dimuka
- 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :

- (1) Transaksi dengan pertukaran
- (2) Transaksi tanpa pertukaran
- (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
- (4) Kejadian yang diakui pemerintah

8. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang pemerintah daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas terdapat dalam Neraca, sedangkan pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Pendapatan dan Beban terdapat pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta Laporan Perubahan Ekuitas. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja dengan anggarannya dalam TA 2019.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019.

Laporan Operasional menyajikan Pendapatan sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan Beban tahun berjalan (PSAP 12 paragraf 8).

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan informasi pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atas pelaksanaan APBD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja dalam satu tahun anggaran. Ringkasan LRA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Ringkasan LRA TA 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2019	Realisasi TA 2019		Realisasi TA 2018
			Jumlah	%	
1	Pendapatan	13.000.000,00	12.350.000,00	95,00	15.400.000.000,00
2	Belanja	1.186.998.286.844,00	1.065.828.307.647,00	89,79	985.496.046.839,14
3	Surplus (Defisit)	(1.186.985.286.844,00)	(1.065.815.957.647,00)	89,79	(985.480.646.839,14)
4	Pembiayaan	0,00	43.680.238,84	0,00	0,00
5	SILPA	(1.186.985.286.844,00)	(1.065.772.277.408,16)	89,79	(985.480.646.839,14)

Penjelasan atas pos-pos LRA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi TA 2019 dan 2018 sebagai berikut.

5.1.1 Pendapatan

TA 2019	TA 2018
Rp12.350.000,00	Rp15.400.000,00

Pendapatan TA 2019 dianggarkan sebesar Rp13.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.350.000,00 atau sebesar 95,00%. Jumlah realisasi Pendapatan TA 2019 tersebut turun sebesar Rp3.050.000,00 atau 80,19% dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2018 sebesar Rp15.400.000,00.

Pendapatan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Pendapatan Daerah	Anggaran Tahun 2019	Realisasi TA 2019		Realisasi TA 2018
			Jumlah	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	13.000.000,00	12.350.000,00	95,00	15.400.000,00
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	13.000.000,00	12.350.000,00	95,00	15.400.000,00

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

TA 2019	TA 2018
Rp 12.350.000,00	Rp 15.400.000,00

Pendapatan Asli Daerah TA 2019 dianggarkan sebesar Rp13.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.350.000,00 atau sebesar 95,00%. Jumlah realisasi Pendapatan TA 2019 tersebut turun sebesar Rp3.050.000,00 atau 80,19% dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2018 sebesar Rp15.400.000,00.

PAD terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah. Adapun ringkasan dan penjelasan masing-masing pos PAD tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Ringkasan Anggaran dan Realisasi PAD TA 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian Jenis PAD	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019		Realisasi TA 2018
			Jumlah	%	
1	Pendapatan Retribusi Daerah	13.000.000,00	12.350.000,00	95,00	15.400.000,00
	Jumlah	13.000.000,00	12.350.000,00	95,00	15.400.000,00

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

TA 2019

Rp 12.350.000,00

TA 2018

Rp 15.400.000,00

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 dianggarkan sebesar Rp13.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.350.000,00 atau sebesar 95,00%. Jumlah realisasi Pendapatan TA 2019 tersebut turun sebesar Rp3.050.000,00 atau 80,19% dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2018 sebesar Rp15.400.000,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019		Realisasi TA 2018
			Jumlah	%	
I.	Retribusi Jasa Usaha	13.000.000,00	12.350.000,00	95,00	15.400.000,00
1	Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga (lapangan tenis)	13.000.000,00	12.350.000,00	95,00	15.400.000,00

5.1.2. Belanja

31 Desember 2019

Rp1.065.828.307.647,00

31 Desember 2018

Rp985.496.046.839,14

Secara garis besar, Belanja terdiri dari dua bagian yakni Belanja Operasional dan Belanja Modal.

Belanja TA 2019 dianggarkan sebesar Rp1.186.998.286.844,00 dengan realisasi sebesar Rp1.065.828.307.647,00 atau sebesar 89,79%, naik sebesar Rp80.332.260.807,86 atau sebesar 8,15% dari realisasi Belanja TA 2018 sebesar Rp985.496.046.839,14. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019 sebagai berikut:

**Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi Jambi
TA 2019 dan TA 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Operasi	1.060.316.227.886,00	912.311.162.778,00	86,04	887.762.411.684,14
2.	Belanja Modal	126.682.058.958,00	153.517.144.869,00	121,18	97.733.635.155,00
Jumlah		1.186.985.286.844,00	1.065.828.307.647,00	89,79	985.496.046.839,14

5.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2019

Rp912.311.162.778,00

31 Desember 2018

Rp887.762.411.684,14

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.060.316.227.886,00 dengan realisasi sebesar Rp912.311.162.778,00 atau sebesar 86,04%, naik sebesar Rp24.548.751.093.86 atau sebesar 2,77% dari realisasi Belanja Operasi TA 2018 sebesar Rp887.762.411.684,14. Rincian Belanja Operasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Provinsi Jambi
TA 2019 dan TA 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Pegawai	648.084.780.936,00	634.632.587.159,00	97,92	582.670.970.194,14
2.	Belanja Barang dan Jasa	412.231.446.950,00	277.678.575.619,00	67,36	305.091.441.490,00
	Jumlah	1.060.316.227.886,00	912.311.162.778,00	86,04	887.762.411.684,14

5.1.2.1.a Belanja Pegawai

31 Desember 2019
Rp634,632,587,159,00

31 Desember 2018
Rp582.670.970.194,14

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp648.084.780.936,00 dengan realisasi sebesar Rp634.632.587.159,00 atau sebesar 97,92% dari anggarannya, naik sebesar Rp51.961.616.964,86 atau sebesar 8,98% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp582.670.970.194,14 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Objek
Provinsi Jambi Periode 2019 dan 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	378.839.143.156,00	366.461.994.889,14	96,73	350.625.779.853,14
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	106.435.446.780,00	105.735.781.633,00	99,34	86.933.643.341,00
3.	Tunjangan Penghasilan Guru	3.852.000.000,00	3.610.000.000,00	93,72	0,00
4.	Belanja Tunjangan Profesi Guru	158.666.505.000,00	158.582.362.637,00	99,95	145.073.559.800,00
5.	Tunjangan Khusus Guru	291.686.000,00	242.448.000,00	83,12	37.987.200,00
	Jumlah	648.084.780.936,00	634.632.587.159,00	93,10	582.670.970.194,14

5.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2019
Rp277.678.575.619,00

31 Desember 2018
Rp305.091.441.490,00

Belanja Barang dan Jasa TA 2019 dianggarkan sebesar Rp412.231.446.950,00 dengan realisasi sebesar Rp277.678.575.619,00 atau sebesar 67,36% dari anggarannya, turun sebesar Rp27.412.865.871,00 atau sebesar 8,99% dari realisasi Belanja Barang TA 2018 sebesar Rp305.091.441.490,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Dinas Pendidikan Periode 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Belanja bahan pakai habis	2.881.454.253,00	2.456.264.200,00	85,24	2.816.864.000,00
2	Belanja bahan/material	1.982.055.894,00	1.318.879.600,00	66,54	2.215.529.013,00
3	Belanja jasa kantor	37.958.994.550,00	30.387.902.990,00	80,05	36.941.285.990,00
4	Belanja perawatan kendaraan bermotor	650.200.000,00	549.343.532,00	84,49	573.162.600,00
5	Belanja cetak dan penggandaan	1.971.267.305,00	1.710.555.311,00	86,77	1.607.906.000,00
6	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/par kir	262.100.000,00	174.900.000,00	66,73	107.600.000,00
7	Belanja sewa Sarana Mobilitas	125.150.000,00	73.650.000,00	58,85	56.800.000,000

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
8	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	183.600.000,00	115.700.000,00	63,02	109.150.000,00
9	Belanja makanan dan minuman	25.934.824.000,00	21.934.499.702,00	84,58	24.734.249.832,00
10	Belanja pakaian dinas dan atributnya	499.500.000,00	499.500.000,00	100,00	542.090.000,00
11	Belanja pakaian kerja	33.750.000,00	33.750.000,00	100,00	49.500.000,00
12	Belanja pakaian khusus dan hari - hari tertentu	1.196.470.000,00	1.132.570.000,00	94,66	1.101.059.800,00
13	Belanja perjalanan dinas	8.063.783.294,00	7.397.693.383,00	91,74	5.843.419.521,00
14	Belanja pemeliharaan	1.214.509.973,00	1.214.095.500,00	99,97	980.053.442,00
15	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat/ ketiga	45.000.000,00	-	-	-
16	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	190.000.000,00	189.750.000,00	99,87	212.080.400,00
17	Belanja honorarium PNS	3.332.489.502,00	2.504.686.500,00	75,16	3.015.644.100,00
18	Belanja honorarium non PNS	82.656.308.179,00	76.544.602.812,00	92,61	57.364.439.000,00
19	Belanja barang untuk diberikan kepada pihak ketiga /masyarakat	1.602.662.000,00	1.495.687.000,00	93,33	1.645.300.000,00
20	Belanja Barang Dana BOS	226.729.828.000,00	113.702.045.089,00	50,15	150.460.067.792,00
21	Belanja perlengkapan/peralatan kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
22	Belanja beasiswa pendidikan	14.667.500.000,00	14.192.500.000,00	96,76	14.697.240.000,00
23	Belanja Honorarium Operator LPPK dan TEPPRA	-	-	-	18.000.000,00
	Jumlah	412.231.446.950,00	277.678.575.619,00	67,36	305.091.441.490,00

Dari realisasi Belanja Barang TA 2019 sebesar Rp277.678.575.619,00, termasuk didalamnya Belanja Barang dan Jasa Dana BOS yang didanai dengan Saldo Kas BOS di Sekolah Tahun 2018.

5.1.2.1.cBelanja Modal

31 Desember 2019
Rp153.517.144.869,00

31 Desember 2018
Rp97.733.635.155,00

Belanja Modal TA 2019 dianggarkan sebesar Rp126.682.058.958,00 dengan realisasi sebesar Rp153.517.144.869,00 atau sebesar 121,18%, naik sebesar Rp55.783.509.714,00 atau sebesar 63.66% dari realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp97.793.635.155,00.

Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset daerah) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. *Output* atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa, dan menambah nilai aset tetap serta ekuitas yang tercatat dalam Neraca.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Jambi
TA 2019 dan TA 2018**

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	39.533.663.000,00	38.190.045.193,00	96,60	26.665.499.259,00
3.	Belanja Bangunan dan Gedung	78.448.027.050,00	75.203.941.275,00	95,86	55.249.312.885,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	275.000.000,00	273.600.400,00	99,49	69.733.00,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.425.368.908,00	39.849.558.001,00	472,97	15.749.090.011,00
Jumlah		126.682.058.958,00	153.517.144.869,00	121,18	97.733.635.155,00

5.3 NERACA

5.3.1. Aset	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp978.384.203.735,72	Rp858.928.530.567,62

Nilai Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp978.384.203.735,72 naik sebesar Rp119.455.673.168,10 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp858.928.530.567,62. Aset sebesar Rp978.384.203.735,72 ini sudah termasuk Aset yang diperoleh dari Realisasi Belanja Modal BOS Tahun 2018 serta saldo kas BOS 2018 sesuai dengan Rekapitulasi Realisasi Belanja Dana BOS, namun belum dapat mengklasifikasikan dan menempatkan pada posisi yang seharusnya. Aset sebesar Rp978.384.203.735,72 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1 Aset Lancar	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp18.572.687.844,84	Rp4.471.801.508,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp18.572.687.844,84 naik sebesar Rp14.100.886.336,84 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.471.801.508,00. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.10 Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Kas di Kas Daerah	-	-
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
3.	Kas di Bendahara BOS	18.568.458.744,84	4.468.963.908,00
4.	Kas Lainnya	-	-
5.	Persediaan	4.229.100,00	2.837.600,00
Jumlah		18.572.687.844,84	4.471.801.508,00

5.3.1.1.a Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	-	-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah nihil

5.3.1.1.b Kas di Bendahara BOS	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp18.568.458.744,84	Rp4.468.963.908,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2019 sebesar Rp18.568.458.744,84 turun sebesar Rp14.099.494.836,84 jika dibanding dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.468.963.908,00 Rincian saldo kas di bendahara BOS dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

5.3.1.1.c Persediaan

31 Desember 2019
Rp4.229.100,00

31 Desember 2018
Rp2.837.600,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.229.100,00 naik sebesar Rp1.391.500,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp2.837.600,00.

Persediaan adalah Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.11 Rincian Persediaan per Jenis

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Alat Tulis Kantor	3.389.100,00	2.622.600,00
2.	Bahan Listrik	840.000,00	0,00
3.	Persediaan Cetak	0,00	215.000,00
Jumlah		4.229.100,00	2.837.600,00

Rincian saldo Persediaan per OPD dan per jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2019
Rp835.355.489.937,88

31 Desember 2018
Rp730.000.703.106,62

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp835.355.489.937,88 naik sebesar Rp105.354.786.831,26 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp730.000.703.106,62. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.12 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Tanah	00,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	238.682.535.527,08	192.331.943.039,92
3.	Gedung dan Bangunan	737.912.045.077,19	667.864.554.772,19
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.608.373.747,21	8.305.931.347,21
5.	Aset Tetap Lainnya	183.322.426.190,72	159.002.320.401,03
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	2.018.028.932,00	2.018.028.932,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(335.187.919.536,32)	(299.522.075.385,73)
Jumlah		835.355.489.937,88	730.000.703.106,62

5.3.1.3.a Peralatan dan Mesin**31 Desember 2019****Rp238.682.535.527,08****31 Desember 2018****Rp192.331.943.039,92**

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp238.682.535.527,08 naik sebesar Rp46.350.592.487,16 atau 24,10% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp192.331.943.039,92. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Saldo Tahun 2018	Rp	192.331.943.039,92
Mutasi Tambah	Rp	42.205.540,00
Reklas	Rp	20.856.650.681,20
Mutasi Kurang/Extracountable	<u>Rp</u>	<u>(12.738.308.927,04)</u>
Jumlah Nilai perolehan	Rp	238.682.535.527,08

Reklasifikasi dari aset selain peralatan dan mesin sebesar **Rp20.856.650.681,20** terdiri dari:

1) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya Bos 2018	20.657.061.181,31
2) Reklasifikasi dari belanja Barang dan Jasa	199.589.499,89
Jumlah	20.856.650.681,20

1. Mutasi Tambah antar OPD sebesar **Rp42.205.540,00** yaitu dari :

<i>Badan Keuangan Daerah</i>	42.205.540,00
Jumlah	Rp42.205.540,00

Extracountable sebesar **Rp12.738.308.927,04** terdiri dari:

1) Dari Alat Kantor Lainnya	2.178.162.230,00
2) Peralatan Mesin Dana Bos 2018	2.776.393.361,00
3) Alat Rumah Tangga	7.783.753.336,04
Jumlah	12.738.308.93704

5.3.1.3.b Gedung dan Bangunan**31 Desember 2019****Rp737.912.045.077,19****31 Desember 2018****Rp667.864.554.772,19**

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp737.912.045.077,19 naik sebesar Rp112.907.992.042,60 atau 8,62% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp667.864.554.772,19. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

Saldo Tahun 2018	Rp	667.864.554.772,19
Belanja Modal 2019	Rp	75.203.941.275,00
Reklas ke alat kantor Lainnya	<u>Rp</u>	<u>(5.156.450.970,00)</u>
Jumlah Nilai perolehan	Rp	737.912.045.077,19

5.3.1.3.d Jalan, Irigasi dan Jaringan

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp8.610.378.047,21	Rp8.305.931.347,21

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.610.378.047,21 naik sebesar Rp304.446.700,00 atau 96,46% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.305.931.347,21. Rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo Tahun 2018	Rp	8.305.931.347,21
Belanja Modal 2019	Rp	273.600.400,00
Reklas dari ATL	Rp	30.846.300,00
Jumlah Nilai perolehan	Rp	8.610.378.047,21

5.3.1.3.e Aset Tetap Lainnya

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp186.332.815.002,03	Rp159.002.320.401,03

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp186.332.815.002,03 naik sebesar Rp27.330.494.601,00 atau 85,33% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp159.002.320.401,03 Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2019 sebagai berikut:

Saldo Tahun 2018	Rp	159.002.320.401,03
Mutasi Tambah	Rp	40.305.195.551,00
Mutasi Kurang	Rp	(12.974.700.950,00)
Jumlah	Rp	186.332.815.002,03

Mutasi tambah sebesar **Rp40.305.195.551,00** diatas terdiri dari:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019 sebesar **Rp40.085.557.751,00.**
2. Reklasifikasi sebesar **Rp219.637.800,00** yaitu Reklasifikasi dari ATL (Aset Renovasi) ke ATL (Buku Umum)

Mutasi kurang sebesar **Rp12.974.700.950,00** terdiri dari:

1. Reklasifikasi dari ATL (Aset Renovasi) ke Peralatan dan Mesin sebesar **Rp12.724.216.850,00,00**
2. Reklasifikasi dari ATL (Aset Renovasi) ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp30.846.300,00**

5.3.1.3.f Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2019
Rp2.018.028.932,00

31 Desember 2018
Rp2.018.028.932,00

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.018.028.932,00 tidak mengalami perubahan dari Tahun 2018.

5.3.1.3.g Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2019
(Rp335.223.627.726,72)

31 Desember 2018
(Rp229.522.075.385,73)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp335.223.627.726,72) naik sebesar (Rp35.701.552.340,99) dibandingkan dengan tahun 2018 (Rp229.522.075.385,73). Adapun Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019.

**Tabel 5.13 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan
per 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Per 31 Desember 2019
1.	Peralatan dan Mesin	(162.933.919.280,02)
2.	Gedung dan Bangunan	(170.575.472.518,72)
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.678.527.737,58)
4.	Aset Tetap Lainnya	(0,00)
	JUMLAH	(335.223.627.726,72)

5.3.1.4 Aset Lainnya

31 Desember 2019
Rp126.856.025.953,00

31 Desember 2018
Rp126.856.025.953,00

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp126.856.025.953,00 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp126.856.025.953,00. Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Saldo Tahun 2018	Rp	126.856.025.953,00
Mutasi Tambah	Rp	0,00
Mutasi Kurang	Rp	0,00
Akumulasi Amortisasi	Rp	(2.400.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya -		
Aset Lain-lain	Rp	0,00
Jumlah	Rp	124.456.025.953,00

Tabel 5.14 Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian	0,00	0,00
3.	Kemitraan dengan pihak ketiga (BOT)	0,00	0,00
4.	Aset Tidak berwujud	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
5.	Aset Lain-lain	124.456.025.953,00	124.456.025.953,00
6.	Akumulasi Amortisasi	(2.400.000.000,00)	(2.400.000.000,00)
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain	0,00	0,00
	Jumlah	124.456.025.953,00	124.456.025.953,00

5.3.1.4.a Aset Tidak Berwujud

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp9.532.845.680,46	Rp11.167.077.438,66
Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.532.845.680,46 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya		
Saldo Tahun 2018	Rp	11.167.077.438,66
Mutasi Tambah	Rp	217.650.000,00
Mutasi Kurang	Rp	(1.851.881.758,20)
Jumlah	Rp	9.532.845.680,46

5.3.1.4.b Aset Lain-lain

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp793.799.303.969,51	Rp734.679.084.488,30
Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp793.799.303.969,51 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp734.679.084.488,30. Rincian mutasi aset lain-lain sebagai berikut:		

Saldo Tahun 2018	Rp	734.679.084.488,30
Mutasi Tambah	Rp	74.978.634.322,76
Mutasi Kurang	Rp	(15.858.414.841,55)
Jumlah	Rp	793.799.303.969,51

5.3.1.4.c Akumulasi Amortisasi

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	(Rp6.861.088.450,47)	(Rp6.448.141.373,80)

5.3.2 Kewajiban

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp130.317.601,00	Rp122.382.525,00

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Jambi. Sampai dengan 31 Desember 2019, kewajiban Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebesar Rp445.044.323.195,12 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Rincian mutasi kewajiban sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp130.317.601,00	Rp122.382.525,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp130.317.601,00 atau naik sebesar Rp7.935.076,00 atau 93,91% dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp122.382.525,00. Kewajiban Jangka Pendek tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.15 Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

Uraian		Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Utang PFK	-	-
2.	Utang Kepada Pihak Ketiga		
3.	Utang Belanja	130.317.601,00	59.772.525,00
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	62.610.000,00
Jumlah		130.317.601,00	122.382.525,00

5.3.2.1.a Utang Belanja

31 Desember 2019
Rp130.317.601,00

31 Desember 2018
Rp59.772.525,00

Utang Belanja per 31 Desember 2019 terdiri dari Utang Dinas Pendidikan sebesar Rp62.610.000,00 merupakan biaya perencanaan dan pengawasan pembangunan RKB tahun 2017 dan Utang Kantor yaitu Beban Listrik, Air dan Telepon Bulan Desember 2018 yang di bayar Tahun 2019 sebesar Rp67.707.601,00

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2019
Rp978.253.886.134,72

31 Desember 2018
Rp858.806.148.042,62

Mutasi dan perbandingan saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Saldo Tahun 2018	Rp	858.806.148.042,62
Mutasi Tambah	Rp	119.447.738.092,10
Saldo Tahun 2019	Rp	978.253.886.134,72

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN LO

31 Desember 2019
Rp12.350.000,00

31 Desember 2018
Rp15.400.000,00

Pendapatan-LO Dinas Pendidikan Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp12.350.000,00 turun sebesar Rp3.050.000,00 atau sebesar 19,81% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp15.400.000,00. Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan Daerah-LO Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	% Thd Total Pendapatan	Realisasi 2018
1.	Pendapatan Asli Daerah	12.350.000,00	100,00	15.400.000,00
2.	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		12.350.000,00	100,00	15.400.000,00

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 100% dan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan adalah sebesar 0,00% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 0,00%.

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

31 Desember 2019

Rp12.350.000,00

31 Desember 2018

Rp15.400.000,00

Pendapatan Asli Daerah-LO Dinas Pendidikan Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp12.350.000,00 turun sebesar Rp3.050.000,00 atau sebesar 19,81% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp15.400.000,00. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2019 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.

Tabel 5.17 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi2019	% thd PAD	Realisasi2018	% thd PAD
1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	12.350.000,00	100,00	15.400.000,00	100,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		12.350.000,00	100,00%	15.400.000,00	100,00%

5.4.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah – LO

31 Desember 2019

Rp0,00

31 Desember 2018

Rp0,00

5.4.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah – LO

31 Desember 2019

Rp12.350.000,00

31 Desember 2018

Rp15.400.000,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Pendapatan Retribusi Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi TA 2019 sebesar Rp12.350.000,00 turun sebesar Rp3.050.000,00 atau sebesar 19,81% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp15.400.000,00.

Tabel 5.18 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	0,00	0,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
3	Retribusi Laboratorium	0,00	0,00
4	Retribusi Ruangan	0,00	0,00
5	Retribusi Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
6	Retribusi Fasilitas Pasar / Pertokoan	0,00	0,00
7	RetribusiTempat Pelelangan Ikan	0,00	0,00
8	RetribusiTempatKhususParkir	0,00	0,00

9	RetribusiTempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	0,00	0,00
10	RetribusiTempat Rekreasi	0,00	0,00
11	RetribusiTempat Olah raga	12.350.000,00	15.400.000,00
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00
13	Retribusi IzinTrayek	0,00	0,00
14	Retribusi Perpanjangan IMTA	0,00	0,00
15	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan	0,00	0,00
Jumlah		12.350.000,00	15.400.000,00

Secara keseluruhan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2019 sebesar Rp12.350.000,00 dan Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2019 sebesar Rp12.350.000,00 tidak terdapat selisih pada Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp12.350.000,00.

Realisasi pendapatan retribusi daerah-LRA dan LO diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Tabel 5.19 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA dan LO Periode 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	PENDAPATAN LRA	PENDAPATAN LO	SELISIH	KETERANGAN
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH TERDIRI DARI :				
A. Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	-	
B. Retribusi Jasa Usaha terdiri atas :	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	
1. Pemakaian atas Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	
Retribusi Laboratorium	0,00	0,00	0,00	
Retribusi Ruangan	0,00	0,00	0,00	
Retribusi Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	
2. Pengelolaan pasar	0,00	0,00	0,00	
3. Retribusi Tempat Lelang	0,00	0,00	0,00	
4. Retribusi tempat parkir	0,00	0,00	0,00	
5. Retribusi tempat penginapan	0,00	0,00	0,00	
6. Tempat rekreasi	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	
Retribusi Tempat Rekreasi	0,00	0,00	0,00	
Retribusi Tempat Olahraga	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	
7. Retribusi Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	
C. Retribusi Perizinan Tertentu	12.000.000,00	12.000.000,00		
D. Koreksi atas Saldo Piutang Retribusi Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	
Jumlah	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	

5.4.1.1.c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

31 Desember 2019

Rp0,00

31 Desember 2018

Rp0,00

5.4.1.1.d Lain-lain PAD Yang Sah – LO

31 Desember 2019

Rp0,00

31 Desember 2018

Rp0,00

5.4.2 BEBAN

31 Desember 2019

Rp960.522.269.931,74

31 Desember 2018

Rp890.157.625.403,37

Jumlah Beban Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp960.522.269.931,74 naik sebesar Rp70.364.644.528,37 atau 7,90% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp890.157.625.403,37 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.20 Realisasi Beban Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Periode 2019
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019
1	Beban Operasi	960.522.269.931,74
Jumlah		960.522.269.931,74

Beban Operasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2019 sebesar Rp960.522.269.931,74 terdiri dari:

Tabel 5.21 Realisasi Beban Operasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Periode 2019
(dalam rupiah)

No.	Beban Operasi	2019	2018
1	Beban Pegawai	634.632.587.159,00	582.688.970.194,14
2	Beban Persediaan	29.084.627.313,00	33.066.557.045,00
3	Beban Jasa	239.439.359.467,00	264.607.241.042,00
4	Beban Pemeliharaan	1.563.849.532,11	1.553.216.042,00
5	Beban Perjalanan Dinas	7.397.693.383,00	5.843.419.521,00
6	Beban Bunga	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00
8	Beban Hibah	0,00	0,00
9	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	35.665.844.150,59	2.398.221.559,23
11	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Jumlah Beban Operasi		960.522.269.931,74	890.157.625.403,37

5.4.4.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai sebesar Rp634.632.587.159,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22 Realisasi Beban Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Periode 2019
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	366.461.994.889,00	350.296.767.353,14
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	105.735.781.633,00	86.933.643.341,00
3	Beban Tunjangan Profesi Guru	158.582.362.637,00	145.073.559.800,00
4	Beban Tunjangan Penghasilan Guru	3.610.000.000,00	329.012.500,00
5	Beban Tunjangan Khusus Guru	242.448.000,00	37.987.200,00
6	Beban Honor Operator LPPK dan Tepra	0,00	18.000.000,00
Jumlah		634.632.587.159,00	582.688.970.194,14

5.4.4.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan sebesar Rp29.084.627.313,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23 Realisasi Beban Persediaan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Beban Bahan Pakai Habis	2.453.287.700,00	2.816.437.400,00
2	Beban Persediaan Bahan/Material	1.318.879.600,00	2.215.529.013,00
3	Beban Cetak dan Penggandaan	1.712.140.311,00	1.607.691.000,00
4	Beban Makanan dan Minuman	21.934.499.702,00	24.734.249.832,00
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	499.500.000,00	542.090.000,00
6	Beban Pakaian Kerja	33.750.000,00	49.500.000,00
7	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	1.132.570.000,00	1.101.059.800,00
8	Beban Barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga	0,00	0,00
Jumlah Beban Persediaan		29.084.627.313,00	33.066.557.045,00

5.4.4.3 Beban Jasa

Beban Jasa sebesar Rp239.439.359.467,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Realisasi Beban Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Beban Jasa Kantor	30.395.838.066,00	36.938.919.750,00
2	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00
3	Beban Honorarium PNS	2.504.686.500,00	3.015.644.100,00
4	Beban honorarium Non PNS	76.544.602.812,00	57.364.439.000,00
5	Beban Premi Asuransi	0,00	0,00
6	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	174.900.000,00	107.600.000,00
7	Beban Sewa Sarana Mobilitas	73.650.000,00	56.800.000,00
8	Beban Sewa Alat Berat	0,00	0,00
9	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	115.700.000,00	109.150.000,00
10	Beban Jasa konsultasi	0,00	0,00
11	Beban kursus, pelatihan, Bimbingan teknis PNS	189.750.000,00	212.080.400,00
12	Beban Barang Dana BOS	113.702.045.089,00	150.460.067.792,00
13	Beban uang untuk diberikan Kepada kepada Pihak Ketiga/ masyarakat	1.495.687.000,00	
14	Beban Jasa luran	0,00	
15	Beban Bea Siswa Pendidikan	14.192.500.000,00	14.697.240.000,00
16	Beban Perlengkapan/Peralatan Kantor	50.000.000,00	
Jumlah Beban Jasa		239.439.359.467,00	264.607.241.042,00

5.4.4.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.563.849.532,11 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25 Realisasi Beban Pemeliharaan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	549.343.532,00	573.162.600,00
2	Beban Pemeliharaan	1.014.506.000,11	980.053.442,00
Jumlah Beban Pemeliharaan		1.563.849.532,11	1.553.216.042,00

5.4.4.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Persediaan sebesar Rp277.485.529.695,11 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1.	Beban Perjalanan Dinas	277.485.529.695,11	5.843.419.521,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		277.485.529.695,11	5.843.419.521,00

5.4.4.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp35.665.844.150,59 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.27 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi
Provinsi Jambi Periode 2019**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.128.037.580,59	(10.298.720.979,39)
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.392.483.959,68	12.484.255.444,53
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.322.610,32	21.687.094,09
4.	Beban Penyusutan tetap Aset Lainnya	0,00	0,00
5.	Beban Penyusutan aset lainnya	0,00	0,00
6.	Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Jumlah		35.665.844.150,59	2.398.221.559,23

5.4.4.7 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain Rp12.738.308.927,04.

5.4.4.8 SURPLUS/DEFISIT LO SEBELUM POS LUAR BIASA

Jumlah Surplus LO Sebelum Pos Luar Biasa untuk Tahun 2019
Rp960.509.919.931,74

5.4.4.9 SURPLUS/DEFISIT LO POS LUAR BIASA

Jumlah Surplus LO untuk Tahun 2019 **Rp0,00**

5.4.4.10 SURPLUS/DEFISIT LO

Jumlah Surplus LO untuk Tahun 2019 **Rp960.509.919.931,74**

5.5 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Isi dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1 EKUITAS AWAL

Jumlah ekuitas awal Tahun 2019 sebesar **Rp868.815.112.051,37** merupakan saldo akhir Tahun 2018.

5.6.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan senilai **Rp960.509.919.931,74**.

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2019 adalah sebesar (**Rp85.885.778,84**), yang terdiri dari:

a) Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar **Rp43.680.238,84**

b) Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap (**Rp42.205.540,00**)

5.6.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp1.079.871.772.245,00

5.6.4 EKUITAS AKHIR

Jumlah ekuitas akhir tahun 2019 adalah sebesar **Rp978.253.886.134,72** dengan rincian sebagai berikut:

1	Ekuitas Awal	Rp	868.815.112.051,37
2	Suplus/Defisit LO	Rp	(960.509.919.931,74)
3	Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	85.885.778,84
4	Kewajiban Utk Dikonsolidasikan	Rp	1.079.871.772.245,00
4	Ekuitas Akhir	Rp	978.253.886.134,72

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 DOMISILI

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Telp. (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P&KJbi@hotmail.com, Dinas Pendidikan terdistribusi di beberapa bidang dan UPT yaitu :

1. Sekretariat
2. Bidang Pembinaan PK-PLK
3. Bidang PP SMA
4. Bidang PP SMK
5. Bidang Pembinaan GTK
6. UPT. BTKP

6.2 PROGRAM KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Dinas Pendidikan merupakan instansi teknis yang berperan di bidang pendidikan, dalam pelaksanaan operasionalnya tugas pokoknya mengacu pada pedoman atau petunjuk yang diterbitkan oleh daerah dan pusat. Kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengacu pada Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pemerataan pembangunan Pendidikan di Provinsi Jambi antara lain:

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - 1 Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
- V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
 - 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan
- VI Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus**
 - 1 Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana PKLK
 - 2 Penyelenggaraan Event-Event Tingkat Provinsi/Nasional
 - 3 Penyelenggaraan PKLK
 - 4 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dan PTK
 - 5 Kegiatan Penyelenggaraan PLA
- VII Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
 - 1 Kegiatan Pelatihan Tenaga Kependidikan dan Laboran Sekolah
 - 2 Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
 - 4 Kegiatan Pelatihan Kepala Sekolah dan Pengawasan Sekolah
 - 5 Kegiatan Pelatihan Kompetensi Guru
 - 6 Kegiatan Pembinaan MGMP
- VIII Program Pembinaan SMA**
 - 1 Kegiatan Pengadaan Peralatan SMA
 - 2 Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama
 - 3 Pembinaan Olimpiade Sain Nasional
 - 4 Kegiatan Pembinaan Debat Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan LCC 4 Pilar (SMA)
 - 5 Bimtek Pengolahan Dana BOS dan APBN (SMA)
 - 6 Kegiatan Rakor Manajemen SMA
 - 7 Kegiatan Pengadaan Meubiler SMA
 - 8 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
 - 9 Kegiatan Pembinaan Peserta O2SN dan FLS2N
 - 10 Kegiatan BOS APBN
- IX Program Pembinaan SMK**
 - 1 Kegiatan Pengadaan Peralatan SMK
 - 2 Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama
 - 3 Kegiatan Pembangunan/Turaf, Pagar SMK
 - 4 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
 - 5 Kegiatan Inovasi dan Kewirausahaan/Re-Engineering
 - 6 Kegiatan Kompetensi Siswa SMK
 - 7 Kegiatan Pembinaan Lomba Siswa Tingkat Nasional
 - 8 Pembinaan Sekolah Rujukan/Kerjasama (SMK)
 - 9 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK
 - 10 Kegiatan Pengadaan Meubiler SMK
 - 11 Pengembangan Kurikulum K13
- X Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**
 - 1 Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
 - 2 Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan

- 3 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
- 4 Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Kab./Kota
- 5 Kegiatan Pembinaan Pramuka
- 6 Kegiatan Pembinaan UKS
- 7 Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren
- 8 Kegiatan Pembinaan Minat Baca
- 9 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi TIK Pendidikan
- 10 Kegiatan Pengelolaan Jejaring dan Publikasi Pendidikan
- 11 Kegiatan Produksi TIK Pendidikan
- 12 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK Pendidikan
- 13 Kegiatan PPDB Online

XI Program Beasiswa dan Bosda

- 1 Beasiswa
- 2 Pembayaran PTK NON PNS SMA/SMK

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang juga merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengguna Anggaran (PA) dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.13.000.000,00 dengan Realisasi pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.12.350.000,00 atau sebesar 95.00%. Sedangkan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.1.186.998.286.844,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp.1.065.828.307.647,00 atau sebesar 89.79%. dengan Realisasi fisik 100% sehingga capaian kinerja keuangan dinyatakan efisien.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan serta dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan.

Jambi, Maret 2020
Plt. Pengguna Anggaran

MUHAMMAD SAHRAN, SE, ME.
NIP 19711109 200501 1 007